



Diploması Pertahanan Di Laut Cina Selatan: Solusi Strategis

(Defense Diplomacy in the South China Sea: Strategic Solution)

Adhit Prayoga, I Putu Astika, Krisna Surya, Pipit Aryati Sani, Rohannisa Naja

Rachma Savitri

Universitas Pertahanan Indonesia

Corresponding Author: Pipitarsani407@gmail.com

Abstract

China's reclamation and infrastructure development in the South China Sea area poses a threat to countries around the region, including Malaysia. China also carried out illegal actions that violated state borders around the South China Sea, one of which was the maneuver of the Chinese air force inside Malaysia's sovereign territory on June 1, 2021. One of Malaysia's steps in dealing with this problem is to use defense diplomacy efforts, both bilateral and multilateral. Bilaterally, Malaysia can cooperate with Vietnam to strengthen maritime security, which is expected to be potential bilateral cooperation to reduce disputed claims in the South China Sea. Meanwhile, within the framework of multilateral cooperation, Malaysia can maximize existing cooperation forums such as through the ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Plus Three (APT), East Asia Summit (EAS), ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM), and ADMM-Plus. In dealing with problems in the South China Sea region, Malaysia has the pillars of a national defense strategy, namely concentric deterrence, comprehensive defense, and credible partnerships.

Keywords: *Defense diplomacy; defense capabilities; capacity building; conflict management; bilateral and multilateral cooperation.*



1. Pendahuluan

Perluasan hegemoni Cina di Laut Cina Selatan yang dibuktikan dengan reklamasi dan pembangunan infrastruktur, menjadi sebuah ancaman bagi negara-negara sekitar wilayah tersebut, termasuk terhadap Malaysia. Cina telah melakukan reklamasi seluas 3,200 hektar sejak tahun 2013 di sekitar Kepulauan Spratly dan Paracel yang dilengkapi dengan pembangunan pelabuhan, gedung-gedung administrasi, hingga infrastruktur militer dengan pengembangan sistem rudal anti kapal dan anti pesawat. Sistem rudal ini menjadi sistem senjata basis darat berkapabilitas tinggi yang digunakan Cina di wilayah-wilayah sengketa. Cina secara otomatis meningkatkan kemampuannya untuk mendeteksi dan menjaga kedaulatannya di Laut Cina Selatan dari klaim negara sekitar, serta mempertahankan kehadiran militer dan paramiliter di kawasan tersebut (Department of Defense of the United States of America, 2019, p. 75).

Cina juga melakukan tindakan-tindakan ilegal yang melanggar perbatasan negara di sekitar Laut Cina Selatan, salah satunya adalah manuver angkatan udara Cina di dalam wilayah kedaulatan Malaysia pada tanggal 1 Juni 2021. 16 pesawat udara Cina dengan tipe Ilyushin Il-76s dan Xian Y-20s terbang di daerah pesisir Malaysia Timur, yang dekat dengan Kota Sarawak di Borneo. Pesawat tersebut kemudian terbang ke Karang Luconia, daerah yang menjadi sengketa antara Cina dan Malaysia di dalam klaim 9 garis putus-putus Cina. Pesawat Cina terus terbang ke arah Kota Kinabalu, mengarah ke arah selatan dan kemudian keluar dari kedaulatan Malaysia (Jaipragas, 2021). Pemerintah Cina kemudian mengklarifikasi bahwa aktivitas angkatan udara di sekitar Laut Cina Selatan, termasuk Malaysia, adalah latihan militer rutin yang jelas melanggar hukum internasional mengenai kedaulatan sebuah negara (Zhuo, 2021).

Perluasan hegemoni dan agresivitas ini ditakutkan akan menimbulkan sebuah konflik dan berkepanjangan jika tidak ditangani dengan cepat, sehingga Amerika Serikat mencoba untuk masuk ke wilayah Indo-Pasifik khususnya Laut Cina Selatan, dengan kebijakan luar negeri *Free and Open Indo-Pacific* yang dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada November 2017. *Free and Open Indo-Pacific* memiliki dua makna, bebas (*free*) adalah konsep yang digunakan untuk



menjelaskan kebebasan terhadap tindakan koersif oleh negara lain, menghormati kedaulatan, ketaatan terhadap peraturan dalam penyelesaian masalah, sedangkan terbuka (*open*) merujuk pada keterbukaan jalur umum yang meliputi laut atau udara, keterbukaan jalur perdagangan dan dalam kegiatan investasi (Pitakdumrongkit, 2019, p. 8).

Dalam bidang pertahanan, Amerika Serikat melakukan strategi *Freedom of Navigation Operations* (FONOPs) yang dilaksanakan hingga 23 kali dalam tahun 2019 (Larter, 2020) dengan sasaran strategis pemindahan 60 persen dari armada angkatan laut Amerika Serikat ke kawasan Indo-Pasifik per tahun 2020 (Iswara, 2020). Strategi ini menjadi langkah utama untuk menjamin kehadiran Amerika Serikat di wilayah tersebut, dengan melakukan operasi penjagaan dalam jarak 12 mil dari pulau-pulau sengketa untuk menyeimbangkan hegemoni militer Cina di Laut Cina Selatan (Broderick, 2015, p. 9).

Amerika Serikat bukan satu-satunya negara yang mencoba untuk meminimalisir hegemoni Cina di wilayah Laut Cina Selatan, tetapi terdapat juga negara lain seperti Prancis, Jerman, hingga Inggris yang turut serta melaksanakan FONOPs untuk menolak klaim Cina terhadap wilayah tersebut (Akita, 2021). Hal ini menyebabkan internasionalisasi kasus Laut Cina Selatan, yang sebelumnya hanya melibatkan negara-negara di Indo-Pasifik, sekarang menjadi permasalahan global dengan keterlibatan kekuatan besar lainnya yang sama-sama mencoba untuk menghentikan perluasan hegemoni Cina di Laut Cina Selatan.

Keterlibatan negara-negara secara global dalam kasus Laut Cina Selatan nyatanya menjadi sebuah tantangan dalam penyelesaian sengketa perbatasan di wilayah tersebut. Cina secara terus menerus mengingatkan bagi negara-negara lain (*outsiders*) untuk tidak terlibat dalam penyelesaian permasalahan Laut Cina Selatan, karena negara-negara tersebut hanya melakukan tindakan ofensif tanpa memikirkan dampaknya terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh negara-negara yang terlibat konflik. Negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan Inggris hanya memperlambat proses penyelesaian sengketa perbatasan di Laut Cina



Selatan dengan terus meningkatkan intensitas konflik melalui cara-cara yang ofensif dan agresif di wilayah tersebut.

“We think non-regional countries should not deliberately amplify such differences or disputes left from the past. Non-regional countries should also not make use of these differences to sow distrust between Cina and ASEAN countries.”

– Perdana Menteri Cina, Wang Yi (Petty, 2021).

Dengan belum selesainya pembahasan mengenai pedoman manajemen konflik di Laut Cina Selatan atau biasa disebut dengan *Code of Conduct in the South China Sea (CoC)*, negara-negara di Indo-Pasifik seperti Malaysia harus menyusun strategi yang melibatkan upaya-upaya penyelesaian masalah secara damai. CoC hanya akan terwujud dengan itikad baik dari negara-negara Asia Tenggara melalui kerangka *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* dan Cina sebagai dua pihak yang memiliki kepentingan di Laut Cina Selatan dengan memperhatikan intervensi pihak-pihak asing yang dapat memprovokasi dan meningkatkan kembali gejolak konflik di Laut Cina Selatan yang kemudian akan menyebabkan perang terbuka di wilayah tersebut. Penyelesaian masalah Laut Cina Selatan secara strategis juga harus melibatkan upaya bilateral, multilateral, dan penguatan pertahanan untuk menghadapi ancaman potensial seperti agresivitas Cina hingga perang terbuka yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah tersebut.

Konsep Diplomasi Pertahanan

Diplomasi pertahanan muncul sebagai suatu konsep yang berdasarkan pada kebutuhan untuk mencapai kepentingan dari aktor-aktor tertentu. Meskipun konsep tersebut merupakan konsep yang baru, dan belum ada definisi yang diakui secara universal, namun sudah banyak pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para ahli untuk, secara lebih jelas memahami makna dari diplomasi pertahanan itu sendiri. Secara umum, diplomasi pertahanan merupakan seluruh kegiatan diplomatic yang berkaitan dengan keamanan nasional dan kegiatan-kegiatan militer seperti pertukaran personel pertahanan guna melakukan pelatihan bersama dengan personel pertahanan dari negara-negara lain. Diplomasi pertahanan juga dapat melibatkan instansi pertahanan



suatu negara secara damai digunakan untuk mengkooptasipemerintah dan institusi negara lain untuk mencapai hasil yang diinginkan (Harun, 2021).

Diplomasi pertahanan akan terus berkembang dengan perubahan paradigma hubungan internasional kontemporer. Diplomasi pertahanan dapat berfungsi secara pragmatis dan transformasional, yang mana secara pragmatis diplomasi pertahanan berfokus pada mempertahankan keadaan kerja sama dan keamanan yang ada antaradua negara atau lebih di kawasan yang dipilih, sedangkan transformasional berfokus pada pelaksanaan tugas-tugas yang terkait dengan penyelesaian krisis dan pengembalian keseimbangan, keamanan, dan kerja sama (Harun, 2021). Diplomasi pertahanan dapat dipraktikan untuk tujuan pencegahan dan berguna sebagai kesempatan untuk bernegosiasi, membangun kepercayaan, dan meminimalisir permusuhan.

Dalam hal ini, diplomasi pertahanan akan memainkan peran yang semakin penting sebagai sarana untuk memproyeksikan status *middle power* Malaysia dan sebagai jembatan bilateral maupun multilateral di regional ASEAN dan sekitarnya (Noor, 2019). Jika dihadapkan dengan sengketa Laut Cina Selatan, Malaysia turut melakukan bentuk-bentuk diplomasi pertahanan yang tercermin dalam berbagai kerjasama baik bilateral maupun multilateral contohnya ADMM, yang merupakan bagian dari diplomasi pertahanan yang mengambil banyak kegiatan yang berkaitan dengan perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan. Diplomasi pertahanan dapat menjadi mekanisme pendukung penyelesaian sengketa, namun tidak serta merta dapat berbuat banyak terhadap penyelesaian konflik seperti Laut Cina Selatan (Harun, 2021).

Malaysia dan Potensi Kerja Sama Bilateral: Penguatan Pertahanan dan Percepatan Penyelesaian Konflik di Laut Cina Selatan

Dalam sistem politik internasional yang anarkis, kerjasama antar negara menjadi terbatas dan sulit untuk dilakukan meskipun terdapat kepentingan bersama antar negara. Ditambah dengan adanya dilemma keamanan ketika tindakan untuk mengamankan kepentingan nasional negara dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakamanan bagi orang lain. Dalam kata lain, kecurigaan dan ketakutan akan eksploitasi tersebut yang akan menghambat jalannya kerjasama antar negara. Tak



terkecuali, kerjasama antar negara di tengah panasnya konflik Laut Cina Selatan, akan mengalami kesulitan dan bahkan sekalipun dapat terjalin, sulit untuk dipertahankan karena terdapat dilemma keamanan antar negara (Storey, 2020, p. 7). Namun, hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi Malaysia untuk terus melakukan pendekatan terhadap Konflik Laut Cina Selatan dengan menggunakan *platform* kerjasama dengan negara – negara lain melalui kegiatan diplomasi pertahanan.

Dalam hal diplomasi, Malaysia dapat dikatakan “gemar” untuk menggunakan “backdoor” diplomacy atau “quite” diplomacy untuk menyelesaikan konflik. Terlepas dari ini, Malaysia juga terus berhati – hati dalam menjalankan hubungan persahabatannya dengan Cina, secara negara tirai bambu tersebut merupakan mitra dagang terbesar yang dimiliki oleh Malaysia. Mengingat ketidakpastian dalam hubungan Amerika Serikat (AS) dengan Cina selama Covid-19, negara – negara di Asia Tenggara, termasuk Malaysia enggan untuk membuat keputusan apa pun yang dapat mengakibatkan mereka terjebak di antara kedua raksasa tersebut. Untuk itu, secara berhati – hati, untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional, serta untuk mengelola ketegangan dan menjaga stabilitas regional, Malaysia dapat melakukan beberapa tindakan dalam rangka “balancing” dengan negara lain (Kwek & Hoo, 2020), secara khusus dengan menggunakan kerjasama bilateral dengan negara tertentu, seperti Vietnam dan Filipina.

Malaysia harus mengelola dan, apabila mungkin, menyelesaikan sengketa maritim antara negara – negara tetangga di Asia Tenggara. Malaysia memiliki klaim kedaulatan yang tumpang tindih dengan Filipina dan Vietnam di Kepulauan Spratly, dan tumpang tindih batas laut dengan keduanya di Laut Cina Selatan. Malaysia harus memperkuat kerjasamanya dengan negara–negara penuntut lainnya, khususnya Vietnam. Vietnam merupakan negara yang menempatkan keamanan maritim sebagai agenda utamanya, dan keberhasilannya dalam mengelola wabah Covid – 19 kemungkinan akan meningkatkan kepercayaannya untuk membentuk kerjasama dengan negara lain (Storey, 2020). Ditambah dengan pembicaraan dan rencana penandatanganan mengenai *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Malaysia dan



Vietnam untuk memperkuat keamanan maritim diharapkan dapat menjadi kerjasama bilateral yang potensial untuk meredam sengketa klaim Laut Cina Selatan (The Star, 2021). Jika memo tersebut membantu kedua belah pihak terkait dengan permasalahan *IUU Fishing*, kerjasama tersebut dapat berjalan lebih mendalam dan memungkinkan untuk melawan atau bahkan berkerja sama dengan Cina. Memo tersebut hingga saat ini menyerukan penggunaan bersama bagian – bagian laut, membentuk mekanisme memerangi kejahatan secara bersama – sama, yang kemudian diharapkan mengharuskan Cina untuk menetapkan batas lautnya. Memorandum Malaysia dan Vietnam tersebut dapat menjadi “role model” bagi kesepakatan lain antara claimant states di Laut Cina Selatan (Jennings, 2021).

Selanjutnya, potensi kerjasama bilateral Malaysia dengan negara tetangganya dapat dilakukan dengan Filipina. Sejak lama, memang Malaysia dan Filipina telah melakukan pertukaran perspektif dalam merespon ketegangan di Laut Cina Selatan. Kedua negara juga telah bertukar pandangan dalam *Philippines–Malaysia Combined Committee on Defense and Cooperation* secara virtual pada bulan Maret yang tidak hanya membahas mengenai konflik di Filipina, namun juga membahas kelangsungan platform dialog dan Latihan militer ketika pandemic Covid–19 telah berakhir. Malaysia dan Filipina memang sudah memiliki *Memorandum of Understanding* mengenai kerjasama pertahanan untuk memastikan hubungan bilateral yang berkelanjutan dan perusahaan militer yang kuat antara kedua negara. Malaysia juga bergerak sebagai kepala *International Monitoring Team*, yang merupakan tim pemantau gabungan yang bertugas untuk memantau pelaksanaan proses perdamaian pemerintah Filipina dan *Moro Islamic Liberation Front* yang juga ditugaskan dalam pelaksanaan keamanan, pembangunan social ekonomi, dan perlindungan kemanusiaan dan sipil di daerah (Boledo, 2021). Meskipun Filipina dan Malaysia tidak memiliki hubungan secara sempurna, kedua negara sama–sama memperjuangkan klaimnya di Laut Cina Selatan dan kerjasama tersebut dapat lebih diperdalam lagi sebagai rencana untuk pengembangan kemampuan bersama sebagai respon terhadap klaim Cina di Laut Cina Selatan.



Rencana pengembangan kemampuan bersama yang menggabungkan dukungan teknis dan pelatihan personel dengan mitra yang kredibel harus diupayakan guna meningkatkan tidak hanya kemampuan Angkatan laut, namun juga kemampuan lain di domain maritim. Namun, penyelesaian bilateral, dalam hal ini tidak memungkinkan karena situasi asimetri. Cina menginginkan negosiasi secara bilateral sebagai cara untuk menyelesaikan masalah, tetapi jika negara penuntut lebih kecil, maka negara tersebut akan dirugikan karena tidak sebanding dengan kekuatan yang dimiliki oleh Cina. Untuk itu, penyelesaian secara multilateral kemudian dianjurkan karena memiliki potensi yang besar guna menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan (Harun, 2021).

Malaysia dan Potensi Kerja Sama Multilateral: Capacity Building dan Manajemen Konflik Laut Cina Selatan

Salah satu kerjasama multilateral penyelesaian permasalahan Laut Cina Selatan dapat dilakukan melalui kerjasama multilateral baik yang berada dalam lingkup organisasi internasional maupun dalam bentuk kerjasama antar negara-negara yang memiliki kepentingan dalam masalah ini. Salah satu bentuk kerjasama melalui organisasi internasional adalah melalui ASEAN. ASEAN memiliki seperangkat aturan main dalam hubungan antarnegara di kawasan Asia Tenggara yang sering disebut dengan *ASEAN Way*. *ASEAN Way* merupakan norma-norma yang melekat pada institusi dengan menekankan prinsip non-intervensi yang menghormati kedaulatan negara lain serta menggunakan pendekatan konsultasi dan konsensus dalam interaksi penyelesaian isu di kawasan daripada penggunaan cara-cara konfrontasi/kekerasan (Darmawan & Kuncoro, 2019).

Pada tahun 2002, ASEAN dan Cina berhasil menandatangani *Declaration on the Conduct of Parties in South China Sea* yang merupakan deklarasi Tata Berperilaku di sekitar kawasan Laut Cina Selatan. Forum lainnya adalah pembahasan mengenai Laut Cina Selatan dilakukan beberapa kali dalam KTT ASEAN. Kemudian masalah ini juga dibahas melalui *ASEAN Regional Forum* (ARF). ARF dibentuk pada tahun 1994. Forum ini dibentuk setelah disepakati oleh para pemerintah negara-negara ASEAN dalam Pertemuan Menteri ASEAN yang diselenggarakan pada 23-25 Juli 1993. Pembahasan



berikutnya melalui melalui pertemuan informal *Managing Potential Conflicts in the South China Sea* (MPCSOUTH CHINA SEA). MPCSOUTH CINA SEA merupakan pertemuan informal yang digagas oleh Indonesia dan didanai oleh Kanada pada tahun 1989.

Seiring dengan perkembangan situasi yang terjadi di wilayah ini, terdapat beberapa kerjasama yang bisa dimaksimalkan oleh Malaysia dalam menghadapi masalah ini. Dalam kerangka multilateral, Malaysia dapat memanfaatkan ASEAN dan mekanisme manajemen konflik yang ditawarkan oleh organisasi regional tersebut melalui *ASEAN Regional Forum* (ARF), *ASEAN Plus Three* (APT), *East Asia Summit* (EAS), *ASEAN Defence Ministers' Meeting* (ADMM), dan *ADMM-Plus*.

Selain dengan negara-negara yang berasal dari kawasan Asia, potensi kerjasama multilateral Malaysia juga bisa dengan mengandalkan kekuatan yang dimiliki oleh kerjasama multilateral lainnya seperti dengan *Fiver Power Defence Arrangements* (FPDA) dimana Malaysia bisa membangun kekuatan internal yang dimiliki dalam hal *capacity building* ataupun *confidence building measure* dalam menghadapi berbagai permasalahan di lingkungan internasional.

Beberapa forum di atas bisa dimaksimalkan oleh Malaysia dan negara-negara lain yang terlibat dalam konflik ini untuk mencari jalan keluar bersama sesuai dengan kesepakatan. Berkaca pada forum-forum kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya, perlu adanya peran aktif dari para negara yang terlibat dalam konflik ini untuk dapat aktif memperjuangkan apa yang menjadi fokus dari setiap negara. Hal ini juga bisa dilakukan oleh Malaysia dalam memanfaatkan kerjasama multilateral dengan negara-negara lain baik dibawah forum internasional ataupun tidak.

Solusi Strategis untuk Memperkuat Pertahanan Malaysia dalam Menghadapi Ancaman di Laut Cina Selatan

Malaysia adalah salah satu negara maritim di Asia Pasifik dengan fokus pertahanan untuk melindungi kedaulatan teritorial dan hak-hak berdaulat, menegakkan pelaksanaan hukum-hukum internasional yang berakitan dengan kebebasan bernavigasi dan penerbangan di atas wilayah negara lain, serta mendukung perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Fokus dilengkapi dengandeskripsi yang



tercantum di dalam buku putih pertahanan Malaysia, dimana strategi- strategi pertahanan yang ada harus dapat mempertahankan dan menegaskan kedaulatan maritim Malaysia serta mempertahankan hubungan ekonomi yang baik dengan Cina. Hubungan ekonomi tersebut dilaksanakan dalam kerangka *the Mekong-Lancang Cooperation* (MLC) dan *Xiangshan Forum* (Harun, 2021).

Untuk menghadapi permasalahan di Laut Cina Selatan, Malaysia memiliki pilar-pilar strategi pertahanan negara yaitu *concentric deterrence*, *comprehensive defence*, dan *credible partnerships*. *Concentric deterrence* dilaksanakan oleh angkatan bersenjata Malaysia, dengan tujuan untuk menimbulkan kekuatan *deterrence* dalam upaya mencegah gangguan eksternal dan konflik. Hal ini menuntut sifat *concentric* atau keselarasan dari setiap angkatan bersenjata untuk melindungi kepentingan nasional. *Comprehensive defence* dilaksanakan oleh setiap lapisan pemerintah dan masyarakat untuk membangun dan memperkuat ketahanan dalam negeri secara komprehensif dengan terus mengembangkan kapabilitas pertahanan, kesiapsiagaan dalam bidang keamanan, dan koordinasi efektif antara setiap institusi negara. Pilar ketiga yaitu *credible partnership* yang menekankan keterlibatan negara dengan mitra eksternal secara internasional tujuannya adalah untuk memperkuat dan memperluas hubungan kerja sama Malaysia dalam sistem internasional sehingga *capacity-building* dan stabilitas regional dapat terwujud secara menyeluruh (Kemhan Malaysia, 2019, p. 40).

Concentric deterrence merupakan hal yang wajib diwujudkan oleh Malaysia untuk menghadapi permasalahan di Laut Cina Selatan, dengan keterlibatan secara komprehensif dari setiap angkatan bersenjata Malaysia. Keselarasan tersebut diatur oleh *Joint Force Headquarters* (JFHQ) dengan menekankan kesamaan doktrin pertahanan, prosedur, sistem, dan peralatan yang digunakan tiga matra angkatan bersenjata, sehingga Malaysia dapat meminimalisir biaya operasi namun dengan daya tangkal yang komprehensif (Kemhan Malaysia, 2019, p. 45). Malaysia harus mempersiapkan operasi amfibi bersama dengan bantuan *multi-role support ship* (MRSS), *Medium Range Air Defence* (MERAD), *Maritime Patrol Aircrafts* (MPAs), dan *Medium Altitude Long*



Endurance Unmanned Aerial System (MALE UAS) sehingga angkatan bersenjata Malaysia dapat bertugas secara efektif di domain darat, udara, ataupun laut.

Strategi pertahanan dalam pilar *comprehensive defence* dapat dilaksanakan dengan peningkatan intensitas kerja sama sipil dan militer di Malaysia melalui konsep Pertahanan Menyeluruh (HANRUH). Angkatan bersenjata adalah pihak utama dalam HANRUH, yang didukung dengan entitas lainnya seperti otoritas sipil untuk memastikan infrastruktur yang memadai dan efektif (transportasi, logistik, komunikasi, dan penyediaan barang-barang vital); sektor swasta untuk memberikan dukungan dalam hal layanan (produk, keahlian, dan keterlibatan sebagai pasukan sukarelawan untuk membantu angkatan bersenjata); serta organisasi non-pemerintah dalam upaya mendukung partisipasi aktif masyarakat Malaysia untuk kesiapsiagaan darurat.

Dua pilar tersebut kemudian diperkuat dengan keterlibatan Malaysia di dalam forum-forum internasional, baik secara bilateral ataupun multilateral. Upaya-upaya diplomasi bilateral dilaksanakan bukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan Cina di Laut Cina Selatan, tetapi menjadi upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan angkatan bersenjata dan meningkatkan ketahanan keamanan Malaysia terhadap masalah-masalah faktual hingga potensial di wilayah tersebut. Kerja sama bilateral di bidang maritim antara Malaysia dan Vietnam, Malaysia dan Filipina dapat dimanfaatkan untuk meredam sengketa klaim Laut Cina Selatan sekaligus memperkuat pertahanan melalui *capacity building* yang melibatkan angkatan bersenjata kedua negara.

Dalam kerangka multilateral, Malaysia dapat memanfaatkan ASEAN dan mekanisme manajemen konflik yang ditawarkan oleh organisasi regional tersebut melalui *ASEAN Regional Forum* (ARF), *ASEAN Plus Three* (APT), *East Asia Summit* (EAS), *ASEAN Defence Ministers' Meeting* (ADMM), dan *ADMM-Plus*. Dalam tataran regional, Malaysia dan anggota ASEAN lainnya harus menemukan sebuah kepentingan bersama dari organisasi tersebut. Selama ini masih terdapat negara-negara anggota ASEAN yang cenderung lebih dekat dengan Cina ataupun Amerika Serikat, dimana hal ini mempengaruhi konsensus mengenai kepentingan bersama dan menghambat jalannya



diplomasi penyamaan isi dokumen CoC. Selain untuk mempercepat mekanisme manajemen konflik di Laut Cina Selatan, ASEAN juga dapat dimanfaatkan oleh Malaysia untuk saling bertukar informasi antara angkatan bersenjata melalui kegiatan *Intelligence Exchange* (INTELEX) Seminar dan *Analyst-to-Analyst Exchange* (ATAX) untuk memperkuat kapabilitas pertahanan dalam negeri Malaysia.

Malaysia juga dapat memanfaatkan aliansi pertahanan antara Australia, Inggris, Malaysia, Selandia Baru, dan Singapura yang dibentuk pada 1971 dan dikenal sebagai *Five Power Defence Arrangements* (FPDA). FPDA menawarkan mekanisme konsultatif untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan profesionalisme dari angkatan bersenjata negara anggota. FPDA dapat menjadi pilihan utama dari Malaysia untuk memperkuat angkatan bersenjata melalui kegiatan latihan perang bersama dalam bentuk *confidence building measure* dan *capacity building* sehingga Malaysia dapat menghadapi berbagai permasalahan di lingkungan strategis, termasuk di Laut Cina Selatan. FPDA bukan hanya menawarkan strategi untuk menghadapi perang konvensional, tetapi juga telah mengadopsi ancaman-ancaman nonkonvensional yang dapat membahayakan stabilitas negara dari berbagai domain.

2. Kesimpulan

Diplomasi pertahanan akan memainkan peran yang semakin penting sebagai sarana untuk memproyeksikan status kekuatan middle power Malaysia dan sebagai jembatan bilateral maupun multilateral di regional ASEAN dan sekitarnya. Diplomasi pertahanan dapat menjadi mekanisme pendukung penyelesaian sengketa, namun tidak serta merta dapat berbuat banyak terhadap penyelesaian konflik seperti Laut Cina Selatan

Dalam menyelesaikan konflik di kawasan ini, Malaysia sebagai salah satu negara yang terdampak langsung dapat dikatakan “gemar” untuk menggunakan “backdoor” diplomacy atau “quite” diplomacy untuk menyelesaikan konflik. Hal ini dikarenakan Malaysia masih harus menjaga hubungan yang dimilikinya dengan Cina. Namun, hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi Malaysia untuk terus melakukan pendekatan



terhadap Konflik Laut Cina Selatan dengan menggunakan *platform* kerjasama dengan negara–negara lain melalui kegiatan diplomasi pertahanan.

Potensi kerjasama yang bisa dilakukan Malaysia dalam upayanya menyelesaikan konflik ini dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral. Dalam hal bilateral, Malaysia dapat memperkuat kerjasama yang dilakukan dengan Vietnam. Rencana penandatanganan mengenai *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Malaysia dan Vietnam untuk memperkuat keamanan maritim diharapkan dapat menjadi kerjasama bilateral yang potensial untuk meredam sengketa klaim Laut Cina Selatan. Sedangkan secara multilateral Malaysia bisa memperkuat dan memaksimalkan forum-forum kerjasama pertahanan yang sudah ada seperti *ASEAN Regional Forum* (ARF), *ASEAN Plus Three* (APT), *East Asia Summit* (EAS), *ASEAN Defence Ministers' Meeting* (ADMM), dan *ADMM-Plus*.

Untuk menghadapi permasalahan di Laut Cina Selatan, Malaysia memiliki pilar-pilar strategi pertahanan negara yaitu *concentric deterrence*, *comprehensive defence*, dan *credible partnerships*. *Concentric deterrence* dilaksanakan oleh angkatan bersenjata Malaysia, dengan tujuan untuk menimbulkan kekuatan *deterrence* dalam upaya mencegah gangguan eksternal dan konflik.

Daftar Pustaka

- Akita, H. (2021, March 5). *Nikkei Asia*. Retrieved from <https://asia.nikkei.com/Spotlight/Comment/European-navies-hold-stronger-Cina-deterrent-than-first-appears>
- Boledo, J. (2021, 13 April). *Malaysia Exchange Best Practices on Handling Disputes in Latest Meeting*. Retrieved from Rappler: <https://www.rappler.com/nation/philippines-malaysia-exchange-best-practices-handling-disputes-meeting-april-2021>



- Broderick, K. (2015). *Chinese Activities in the South Cina Sea: Implications for the American Pivot to Asia*. Virginia: Project 2049 Institute.
- Department of Defense of the United States of America. (2019). *Military and Security's Developments Involving the People's Republic of Cina*. The United States of America: Office of the Secretary of Defense.
- Harun, R. (2021, Juli 2). Defence Diplomacy in the South Cina Sea: Strategic Solutions. (P. A. Sani, Interviewer)
- Harun, R. (2021, Juni 28). Defence Diplomacy: Concept and Practice. (L. L. Rahman, Interviewer)
- Iswara, A. J. (2020, June 23). *Kompas*. Retrieved from <https://www.kompas.com/global/read/2020/06/23/220813770/Cina-sebut-militer-as-kerahkan-kekuatan-besar-ke-asia-pasifik?page=all>
- Jaipragas, B. (2021, June 1). *South China Morning Post*. Retrieved from <https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3135661/south-Cina-sea-malaysia-scrambles-jets-intercept-16-chinese>
- Jennings, R. (2021, April 16). *How a Vietnam-Malaysia Fishing MOU Could Ease the Wider South Cina Sea Dispute*. Retrieved from VOA News: <https://www.voanews.com/east-asia-pacific/how-vietnam-malaysia-fishing-mou-could-ease-wider-south-Cina-sea-dispute>
- Kemhan Malaysia. (2019). *Defence White Paper*. Kuala Lumpur: Kementerian Pertahanan Malaysia.
- Kwek, I., & Hoo, C.-P. (2020, May 29). *Malaysia's Rationale and Response to SouthCina Sea Tensions*. Retrieved from Asia Maritime Transparency Initiative: <https://amti.csis.org/malysias-rationale-and-response-to-south-Cina-sea-tensions/>
- Larter, D. B. (2020, February 5). *Defense News*. Retrieved from <https://www.defensenews.com/naval/2020/02/05/in-challenging-Cinas-claims-in-the-south-Cina-sea-the-us-navy-is-getting-more-assertive/>



- Noor, F. A. (2019, Juli 4). *Projecting Malaysia as a Middle Power: How Defence Diplomacy Complements Our Foreign Policy Agenda*. Retrieved from Malaysian Institute of Defence and Security: <http://midas.mod.gov.my/defence-white-paper/commentaries/77-projecting-malaysia-as-a-middle-power-how-defence-diplomacy-complements-our-foreign-policy-agenda>
- Petty, M. (2021, January 25). *Reuters*. Retrieved from <https://www.usnews.com/news/world/articles/2021-01-25/explainer-south-cina-sea-tension-flares-again-as-biden-takes-charge>
- Pitakdumrongkit, K. K. (2019). *The Impact of the Trump Administration's Indo-Pacific Strategy on Regional Economic Governance*. Hawaii: East-West Center.
- Storey, I. (2020). Malaysia and the South Cina Sea Dispute: Policy Continuity amid Domestic Political Change. *Perspective Issue 2020 No. 18*, 1-10.
- The Star. (2021, April 5). *Vietnam and Malaysia Expected to Ink MoU on Maritime Security This Year*. Retrieved from The Star: <https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2021/04/05/vietnam-and-malaysia-expected-to-ink-mou-on-maritime-security-this-year>
- Zhuo, C. (2021, June 03). *Cina Military*. Retrieved from http://english.Cinamil.com.cn/view/2021-06/03/content_10043535.htm